

Revitalisasi Kesadaran Politik dalam Menghadapi Era Budaya Politik di Indonesia

Fadhil Muhammad Agung^{a,1*}

^a Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

¹ fadhilagung21@upi.edu*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 20 September 2023;

Revised: 28 September 2023;

Accepted: 2 Oktober 2023.

Kata-kata kunci:

Kesadaran Politik;

Partisipasi Politik;

Budaya Politik.

ABSTRAK

Kita mengetahui bahwasanya setiap negara yang memiliki masyarakat tentunya akan bertemu kenyataan dengan harapan akan sebuah kesejahteraan. Masyarakat yang merupakan bagian dari negara mempunyai hak untuk dapat merasakan kesejahteraan atau kemakmuran yang diberikan oleh negara itu sendiri. Namun, yang harus diperhatikan mengenai bagaimana masyarakat untuk mengutarakan sebuah pemikiran terkait bagaimana cara menyalurkan keinginan, kendala, atau apapun yang berpengaruh dalam kehidupan sosial berbangsa dan bernegara. Dalam artikel ilmiah akan dijelaskan bagaimana meningkatkan sebuah kesadaran politik terutama dalam budaya politik yang digadang-gadang bukan malah mendukung sebuah kebijakan politik, melainkan lebih kepada tidak adanya sebuah partisipasi bahkan dapat dikatakan kurangnya memahami urgensi penting dari sebuah aktifitas politik, yang mana secara tidak langsung produk politik akan berpengaruh kepada seluruh lapisan masyarakat.

Keywords:

Political Consciousness;

Political Participation;

Political Culture.

ABSTRACT

Revitalization of Political Awareness in the Face of the Era of Political Culture in Indonesia. We know that every country that has a society will certainly meet reality in the hope of prosperity. People who are part of the state have the right to be able to feel the welfare or prosperity provided by the state itself. However, what must be considered is how the community expresses a thought related to how to channel desires, obstacles, or anything that affects the social life of the nation and state. In scientific articles, it will be explained how to increase political awareness, especially in political culture, which is predicted not to support a political policy, but rather to the absence of participation and can even be said to lack understanding of the important urgency of a political activity, which indirectly political products will affect all levels of society.

Copyright © 2023 (Fadhil Muhammad Agung). All Right Reserved

How to Cite : Agung, F. M. (2023). Revitalisasi Kesadaran Politik dalam Menghadapi Era Budaya Politik di Indonesia. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(10), 360–364. <https://doi.org/10.56393/decive.v3i10.2052>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Permasalahan yang menyangkut kesadaran politik hingga memerlukan sebuah upaya revitalisasi merupakan permasalahan yang memiliki tingkat urgensi tinggi, menimbang sebuah kesadaran politik merupakan kunci untuk mencapai masyarakat yang mengerti, paham, dan menyadari bahwsanya kesejahteraan merupakan hak bagi tiap bagian- bagian masyarakat (Yuniar, 2022). Kesadaran politik yang kurang dalam lapisan masyarakat tentunya akan mengakibatkan sebuah kerancuan diantaranya ketidakmerataan kesejahteraan pada setiap golongan atau lapisan masyarakat dan yang kedua kepada penyelewengan hak kekuasaan atau secara kasar dikatakan penyalahgunaan kekuasaan (Anggraeni et al., 2021).

Salah satu permasalahan dari kurangnya kesadaran berpolitik pada masyarakat Indonesia, penulis ambil contoh dari hasil golongan putih pada PILKADA yang diadakan pada tahun 2020 (Claudya dkk, 2023). Golongan putih merupakan masyarakat yang tidak menggunakan hak suaranya dengan baik untuk menentukan pasangan calon presiden untuk memimpin sebuah negara (Pogalin, 2015). Dilansir dari media masa merdeka.com, ada sekitar 100,3 juta orang yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada 2020. Dari jumlah tersebut, KPU menargetkan tingkat partisipasi pemilih sebesar 77,5 persen. Namun dari data sejumlah daerah memperlihatkan jumlah masyarakat yang enggan menggunakan hak pilihnya ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) (Marasabessy dkk, 2021). Bahkan, angka tersebut melebihi suara calon kepala daerah yang mendapat angka tertinggi. Beberapa daerah yang mengalami golput tinggi ialah Medan, Depok, Kediri, Tangerang Selatan dan Denpasar. Tak sedikit orang yang memutuskan untuk tidak menggunakan hak suaranya. Dari permasalahan tersebut dapat kita sadari bahwsanya tingkat kesadaran berpolitik yang masih dapat dikatakan pasif, masih marak terjadi dalam lingkungan politik masyarakat Indonesia.

Kesadaran politik merupakan keadaan kesadaran seseorang secara penuh akan pengetahuan berbagai hal terkait proses politik dalam masyarakat (Triono, 2017). Menurut Almond dan Verba (1984), seseorang dianggap memiliki kesadaran politik apabila ia telah menyadari dan mengetahui hal-hal yang terkait dengan sistem politik baik dari segi output maupun input. Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang dinilai berkaitan dengan topik pembahasan, antara lain: (1) Bagaimana menerapkan kesadaran politik di masyarakat? (2) Apa hambatan masyarakat dalam memahami kesadaran politik? (3) Mengapa kesadaran politik memiliki urgensi tinggi terhadap budaya politik di Indonesia?

Dari beberapa rumusan masalah tersebut hipotesis mengenai penerapan kesadaran politik di masyarakat. Pertama terkait cara yang paling efektif adalah dengan sosialisasi harapan kesejahteraan yang digantungkan kepada pemimpin, dalam artian menyebarluaskan aktifitas-aktifitas politik yang akan menjadi bulan-bulanan kacamata masyarakat Indonesia untuk menilai dan memahami bagaimana politik itu bekerja, sehingga masyarakat akan mengerti apa dampak atau efek domino yang terjadi saat hak dalam perpolitikan tiap-tiap masyarakat digunakan. Kemudian hipotesis terkait masalah yang kedua, hambatan yang kerap kali menghambat masyarakat dalam memahami atau menyadari sebuah fungsi politik adalah tuntutan konservatif yang memang terbentuk dari masa ke masa, dimaksudkan bahwa hal tersebut terjadi karena beredarnya stereotip bahwa politik bukan semata-mata berkaitan dengan pemerintahan, namun berkaitan dengan unsur kejahatan kriminal, maka dari itu kesadaran berpolitik masyarakat cenderung untuk membuat batasan, ataupun acuh tak acuh terhadap kondisi pemerintahan yang mana dominan akan fenomena politik didalamnya (Paramitha et al., 2022).

Metode

Bagian Dalam metode penelitian dibahas metode yang merupakan pendekatan praktis dalam setiap penelitian ilmiah. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan bagi setiap peneliti mengetahui suatu peristiwa atau keadaan yang diinginkan. Untuk menerapkan teori terhadap permasalahan, diperlukan metode khusus yang dianggap relevan dan dapat membantu memecahkan permasalahan. Penelitian ini

bersifat kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati. Metode deskriptif dipilih untuk menjelaskan masalah pada penelitian ini karena metode ini adalah sebuah metode penelitian yang membuat gambaran mengenai kejadian untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti (Moelong, 2001). Desain penelitian yang bersifat deskriptif juga dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (individu, komunitas, lembaga masyarakat, dll) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Nawawi, 1997). Fakta-fakta yang didapatkan di lapangan diharapkan dapat memberi gambaran tentang bagaimana korupsi dilakukan dalam pengadaan barang dan jasa di pemerintah daerah. Penulis melakukan proses studi pustaka dengan mengunjungi berbagai perpustakaan (library research) dan mengumpulkan data-data primer melalui bahan-bahan tulisan dalam berbagai bentuk, yang diharapkan dapat memudahkan penulis dalam melakukan penelitian ini.

Hasil dan pembahasan

Pada pembahasan ini akan menjelaskan mengenai hasil dari penelitian untuk menjawab permasalahan yang sebelumnya telah dirumuskan. Akan dijelaskan kembali mengenai apa itu sebuah kesadaran politik. Pengertian yang sedikit berbeda dari Miriam Budiardjo, kesadaran politik merupakan perasaan bahwa dirinya diperintah dan percaya bahwa mereka dapat sedikit banyak mempengaruhi pemegang kekuasaan atau percaya bahwa mereka memiliki efek politik (*political efficacy*). Dia menambahkan, kesadaran politik merupakan salah satu faktor penting tingginya tingkat partisipasi politik (Budiardjo, 2010). Kesadaran politik dan partisipasi politik memiliki hubungan yang berbanding lurus. Asumsinya semakin tinggi kesadaran politik maka semakin tinggi tingkat partisipasi politik masyarakat. Semakin seseorang sadar bahwa dirinya diperintah maka orang itu akan menuntut akan hak bersuara dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dari pemaparan hal tersebut dapat dikaitkan dengan adanya sebuah peran partisipasi politik yang menjadi tingkatan setelah sebuah kesadaran berpolitik.

Bagi masyarakat yang sebelumnya belum menyadari kemudian akan berpartisipasi setelah rasa kesadaran politik itu muncul. Ini berhubungan dengan apa yang menjadi permasalahan awal mengenai bagaimana cara menerapkan sebuah kesadaran politik yang nantinya akan membuahkan sebuah aktifitas politik. Dengan pembiasaan dalam ikut berpartisipasi dalam hal politik lambat laun akan meningkatkan rasa sadar yang hakiki, dalam artian sebuah partisipasi politik dapat dikatakan wujud implementasi niat berpolitik dalam diri sehingga mengembangkan rasa kesadaran terhadap politik itu sendiri.

Partisipasi politik diartikan sebagai keikutsertaan masyarakat dalam proses politik. Menurut Kaase dan Marsh, partisipasi politik adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh individu-individu warga negara secara sukarela yang bertujuan untuk mempengaruhi orang-orang untuk pemilihan pejabat pemerintahan atau kebijakan yang akan mereka ambil (Mujani, n.d.). Pengertian serupa juga diungkapkan oleh Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson, partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah (Rohaniah & Efriza, 2015). Maka dari itu hasil dari cara menerapkan sebuah kesadaran politik adalah dengan adanya sebuah partisipasi politik yang didasari akan niat tuntutan kesejahteraan maupun nilai kontra terkait kebijakan pemerintah atau aktifitas politik apapun.

Selanjutnya, pembahasan mengenai hambatan kesadaran politik yang terjadi pada masyarakat. Oakley 1991 mengatakan bahwasanya faktor penghambat masyarakat dalam meningkatkan kesadaran politik sehingga berpengaruh kepada partisipasi politik yang pertama adalah hambatan struktural, hambatan yang dipengaruhi oleh sebuah sistem lingkungan politik itu sendiri, terlebih jika sistem politik yang bersifat sentralisasi (Malihah et al., 2020). Kedua, hambatan administrasi, hambatan ini lebih mengacu kepada penguasaan dalam sistem administrasi pengendalian, pengambilan keputusan, alokasi sumber, atau apapun yang jarang melibatkan masyarakat dalam sebuah upaya pembangunan. Dan yang

terakhir yang dirasa merupakan faktor penghambat paling berpengaruh diantara faktor lainnya adalah hambatan sosial (Oakley, 1991), mental yang terbentuk dan bersifat konservatif akan membuat stigma yang sama terhadap budaya politik dari masa ke masa, hal ini bisa saja dilihat secara faktor-faktornya antara lain kesenjangan sosial, ketidak setaraan gender, stigma masyarakat, dan terbiasa untuk mengikuti aturan dari pihak yang kedudukannya diatas dari kita. Hal-hal demikian yang sebelumnya sudah dijelaskan memiliki petunjuk penting bagaimana cara menghidupkan kembali api politik pada tiap-tiap kesadaran masyarakat terutama masyarakat Indonesia.

Dan pembahasan yang terkait mengenai arti penting dari sebuah kesadaran politik yang memiliki urgensi penting dalam budaya politik di Indonesia. Tidak jauh dengan apa yang telah dijelaskan bahwa kesadaran politik merupakan tindakan secara sadar untuk memahami apa tujuan dari politik itu sendiri, bagaimana politik bekerja, dan esensi politik secara keseluruhan. Hal-hal tersebut merupakan bagian dari kesadaran politik. Tentunya politik tidak bisa dilepaskan dari sebuah negara, hal-hal yang berkaitan dengan politik akan menjadi pelumas berjalannya sebuah roda pemerintahan. Budaya politik Budaya politik adalah aspek politik dari nilai-nilai yang terdiri atas pengetahuan, adat istiadat, tahayul, dan mitos. Semuanya dikenal dan diakui oleh sebagian besar masyarakat. Budaya politik memberikan pemahaman rasional untuk menolak atau menerima nilai-nilai dan norma lain. Budaya politik dapat dilihat dari aspek doktrin dan aspek generiknya. Yang pertama menekankan pada isi atau materi, seperti sosialisme, demokrasi, atau nasionalisme. Yang kedua (aspek generik) menganalisa bentuk, peranan, dan ciri-ciri budaya politik, seperti militan, utopis, terbuka, atau tertutup. Dengan demikian hal tersebut sangat sejalan dan berkaitan erat dengan arti penting atau esensi kesadaran politik itu sendiri.

Simpulan

Kesadaran politik merupakan upaya sadar yang sangat berpengaruh terhadap dunia perpolitikan terutama dengan latar belakang budaya politik yang kental. Pembahasan terkait kesadaran politik berkaitan erat dengan apa yang dinamakan partisipasi politik, seperti yang dijelaskan oleh Miriam Budiardjo, kesadaran politik merupakan perasaan bahwa dirinya diperintah dan percaya bahwa mereka dapat sedikit banyak mempengaruhi pemegang kekuasaan atau percaya bahwa mereka memiliki efek politik (*political efficacy*). Dia menambahkan, kesadaran politik merupakan salah satu faktor penting tingginya tingkat partisipasi politik. Kesadaran politik dan partisipasi politik memiliki hubungan yang berbanding lurus. Asumsinya semakin tinggi kesadaran politik maka semakin tinggi tingkat partisipasi politik masyarakat. Semakin seseorang sadar bahwa dirinya diperintah maka orang itu akan menuntut akan hak bersuara dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian bagaimana hambatan-hambatan yang dijelaskan, mengapa kesadaran politik tidak bisa merata dalam hal penerapannya, faktor utamanya ialah hambatan sosial, mental yang terbentuk dan bersifat konservatif akan membuat stigma yang sama terhadap budaya politik dari masa ke masa, hal ini bisa saja dilihat secara faktor-faktornya antara lain kesenjangan sosial, ketidak setaraan gender, stigma masyarakat, dan terbiasa untuk mengikuti aturan dari pihak yang kedudukannya lebih tinggi. Maka dari itu, kita harus senantiasa bisa untuk memperbaiki apa yang seharusnya butuh dan penting untuk ditempatkan sebagai prioritas negara. Upaya ini dirasa sangat memberikan dampak positif jika saja masyarakat paham dan berpartisipasi politik dalam kelangsungan aktifitas pemerintahan, sehingga terciptanya lingkungan yang makmur dan sejahtera.

Referensi

- Anggraeni, L., Darmawan, C., Tanszil, S. W., & Jubaedah, E. (2021). Promoting Ksatria Bela Negara comic through the Webtoon for the prevention and control Covid-19. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 18(1), 138–147. <https://doi.org/10.21831/jc.v18i1.39377>
- Claudya, S. E., Cahyani, N., Togatorop, I. H., Tjahyadi, E. A., Andini, M., Marsevani, M., ... & Sakti, W. L. (2023, September). Peran Bawaslu dan Mahasiswa Universitas Internasional Batam dalam Membangun Sifat Partisipatif Pemilu kepada Pemilih Pemula SMA Negeri 24 Batam.

- In *National Conference for Community Service Project (NaCosPro)* (Vol. 5, No. 1, pp. 644-650).
- Gabriel Almond dan Sidney Verba. (1984). *Budaya Politik: Tingkah Laku Politik dan Demorasi di Lima Negara*. Penerjemah Sahat Simamara. Jakarta: PT Bina Aksara.
- Malihah, E., Nurbayani, S., & Anggraeni, L. (2020). Why is There Zero Women Candidate for Governor Election in West Java, Indonesia? *Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture*, 12(1), 1–11. <https://doi.org/10.15294/komunitas.v12i1.21373>
- Marasabessy, A. C., Nurdiana, N., Setiawati, S., & Utami, I. S. (2021). Perilaku pemilih pada pemilihan umum kepala daerah Kota Tangerang Selatan dalam masa pandemi covid-19. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 21(1), 8-19.
- Miriam Budiardjo. (2010). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Moelong, L. J. (2001). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, H. (1997). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Oakley, Peter, et al. (1991). *Project with People, The Rule Practice of Participation in Rulal Development*, International Labour Office, Ganeva
- Paramitha, S. T., Komarudin, Fitri, M., Anggraeni, L., & Ramadhan, M. G. (2022). Implementation of Healthy Gymnastics and Use of Technology as an Effort to Maintain Body Immunity during the Pandemic. *International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology*, 10(2), 328–340. <https://doi.org/10.46328/IJEMST.2290>
- Pogalin, R. (2015). Perilaku Golongan Putih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Desa Lolah Kecamatan Tombariri Timur1. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 2(6), 1102.
- Rohaniah, Yoyoh & Efriza. (2015). *Pengantar Ilmu Politik, Kajian Mendasar Ilmu Politik*. Malang: Intrash Publishing.
- Saiful Mujani. *Muslim Demokrat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Triono, T. (2017). Pemilu dan Urgenitas Pendidikan Politik Masyarakat dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik. *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 5(2).
- Yuniar, R. (2022). *Jembatan Emas Ketahanan Pangan-Perspektif Komunikasi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.